

RINGKASAN

Salah satu masalah mendasar yang di hadapi oleh Pemerintah Indonesia adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Untuk itu pemerintah perlu mewujudkan akuntabilitas untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas demi mengembalikan kepercayaan publik, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, dalam mendorong keterbukaan informasi dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah Kabupaten Banyumas mengangkat PPID dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. PPID merupakan salah satu aktor kunci pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, untuk itu PPID juga perlu akuntabel pada kinerjanya. Akan tetapi masih terdapat masalah dalam pelayanan informasi publik di mana dalam *website* organisasi perangkat daerah dan *website* dari PPID itu sendiri belum terdapat informasi yang seharusnya disediakan, yang mana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPID dalam mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai akuntabilitas dari PPID dalam pelayanan informasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan konsep akuntabilitas yang dikemukakan oleh Koppell (2005: 94-108). Koppell (2005: 95-99) memberikan konsepsi akuntabilitas yang difokuskan pada akuntabilitas proses dengan lima dimensi akuntabilitas. Lima dimensi tersebut yaitu: transparansi; liabilitas; pengendalian; responsibilitas; dan responsivitas. Transparansi merupakan nilai dasar dari akuntabilitas di mana birokrat atau organisasi yang akuntabel harus menjelaskan atau melaporkan kegiatannya. Dimensi liabilitas ini memberikan pandangan bahwa individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas kinerjanya, dihukum karena penyimpangan dan diberi *reward* untuk kesuksesannya. Dalam dimensi pengendalian, pertanyaan kuncinya yaitu apakah organisasi melakukan apa yang pemberi amanah (*principal*) perintahkan? Responsibilitas dalam konsep akuntabilitas ini mengarah pada batasan organisasi selain dari pemberi amanah, yaitu hukum, peraturan, dan norma. Dimensi responsivitas memiliki arti lebih horizontal di mana apakah organisasi dapat memenuhi ekspektasinya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah

purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan dalam dimensi transparansi, Mekanisme pertanggungjawaban secara horizontal oleh PPID dilakukan lewat pemberian informasi di *website* belum dilakukan dengan maksimal. Akan tetapi kemudahan dalam akses informasi telah dilakukan dengan baik lewat pelayanan informasi publik yang cepat. Kemudian dalam dimensi liabilitas, PPID Kabupaten Banyumas belum menghadapi konsekuensi atas kinerjanya. Pada dimensi pengendalian, tidak terdapat kontrol langsung yang dilakukan oleh pemberi amanah yang kemudian kontrol dilakukan oleh koordinator kepada PPID Kabupaten Banyumas, akan tetapi hal tersebut belum menyeluruh kepada seluruh anggota. Selain itu, belum seluruh anggota PPID membuat dan melaporkan hasil kegiatannya atau pelayanan informasi publik yang dilakukannya. Terdapat sumber pengendalian lain pada PPID Kabupaten Banyumas yaitu dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang melakukan *monitoring* dan evaluasi akan tetapi hanya untuk penilaian penghargaan keterbukaan informasi publik. Pada dimensi responsibilitas, PPID Kabupaten Banyumas belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman anggota PPID tentang kewajibannya yang masih kurang. Dalam dimensi responsivitas, PPID Kabupaten Banyumas belum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Belum adanya upaya dari PPID Kabupaten Banyumas dalam menjaring kebutuhan publik. Untuk itu dapat dikatakan bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas belum maksimal.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

SUMMARY

One of the fundamental problems faced by the Indonesian Government is the decline in public trust to public bureaucracy. The government needs to realize accountability to regrow public trust in the performance of the bureaucracy. In efforts to realize accountability in order to restore public trust, Banyumas regency government has appointed information and documentation management officer (IDMO). Information and documentation management officer is one of the key actors in government to achieve openness of public information, therefore information and documentation management officer also needs to be accountable to its performance. But there are still problems in the public information services where the website of regional apparatus organization and website of information and documentation management officer itself has not contained information that should be provided, and that it is the responsibility of information and documentation management officer manage and conduct public information services as mandated.

This study aims to find out and describe the accountability of information and documentation management officer of Banyumas Regency. This study used the concept of accountability from Koppell (2005: 94-108). Koppell (2005: 95-99) Koppell gave the conception of accountability focused on accountability process with five dimensions of accountability. The five dimensions of accountability offered are transparency liability, controllability, responsibility, and responsiveness. Transparency is the literal value of accountability, the idea that an accountable bureaucrat and organization must explain or account for its actions. In view of the liability individuals and organizations should be held liable for their actions, punished for malfeasance, and rewarded for success. In dimension controllability the key question: Did the organization do what its principal commanded? Bureaucrats accountable in the controllability sense are constrained by the orders of principals. Alternatively, bureaucrats and organizations can be constrained by laws, rules, and norms. This dimension of accountability is labeled responsibility. Responsiveness means more horizontal whether the organization can fulfill expectations. The research method used in this study is qualitative descriptive. Informant were taken by purposive sampling. The data collection conducted by in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis method used is interactive model. Data validity is tested with the triangulation techniques.

The results showed in transparency, the mechanism of horizontal accountability by information and documentation management officer of Banyumas Regency is done through the provision of information on the website

have not done. However, the ease of access to information has been done well through the rapid public information service. Later in the liability, information and documentation management officer of Banyumas Regency not yet face consequences for their performance. In controllability, there is no direct control by the principal, then the control carried out by the coordinator, but it's not comprehensive to all members of information and documentation management officer of Banyumas Regency. Moreover, have not all members of the information and documentation management officer make and report the activities or public information services that have been done. There are other sources of control on information and documentation management officer that is from Central Java Province Information Commission for monitoring and evaluation but only for the assessment of the award Openness of Public Information. On the dimension of responsibility, information and documentation management officer of Banyumas Regency have not carry out their duties in accordance with existing rules. It can be seen from member information and documentation management officer understanding of their responsibilities that are still lacking. In the dimension of responsiveness information and documentation management officer of Banyumas Regency unable to meet the needs and demands of the public. The absence of information and documentation management officer of Banyumas Regency efforts in attracting the public needs. Therefore it can be said that the accountability performed by the Information Management and Documentation Officer of Banyumas Regency has not been maximized.

Keywords: Accountability, information and documentation management officer Public Information.